

Ba'asyir dalam Pertarungan Wacana

Emma Khotimah

ABSTRAK

Situasi internasional pascatragedi WTC sangat sensitif terhadap gerakan dan kelompok yang dipandang radikal, ekstrem, apalagi yang “berbau” terorisme. Ironisnya, semua keonaran ini telah ditudingkan kepada kelompok Islam garis keras sebagai pelakunya. Media massa secara simultan mem-blow-up relasi Islam dan terorisme dari waktu ke waktu. Bahkan, Indonesia terkena getahnya, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam ini pun dikukuhkan oleh media Barat dan didukung oleh media massa nasional sebagai sarang teroris, lalu Abu Bakar Ba'asyir dicap sebagai pemimpin teroris di kawasan Asia Tenggara. Meski sampai saat ini tim penyidik belum menemukan bukti keterlibatan Ba'asyir dalam aksi terorisme, Ba'asyir masih mendekam di penjara sampai 1 Maret 2002 sesuai BAP Polri. Di media massa, Ba'asyir dan kelompok Islam cenderung telah terpinggirkan dalam pertarungan wacana.

Pengantar

Pascatragedi peledakan bom di Bali, 12 Oktober 2002, nama Abu Bakar Ba'asyir semakin melegenda, atas peran yang ditudingkan kepadanya sebagai tokoh teroris dunia di samping Usamah bin Ladin bersama jaringan Al-Qaidanya. Jika Usamah, seperti ditulis sebuah buku, tergolong ke dalam 55 tokoh besar dunia, penulis buku itu tentunya perlu menambahkan tokoh ke-56, yaitu Ba'asyir. Betapa tidak? Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, yang dikenal lugas dalam berbicara ini, bahkan disebut-sebut sebagai “Musuh Amerika No 2” di dalam buku terbaru Ibrahim dan Romli (2003: 32), berjudul *Kontroversi Ba'asyir: Jihad Melawan Opini 'Fitnah' Global*. Potretnya terpampang di media nasional dan internasional. Bahkan, pascapeledakan di Bali, media massa mengekspos semua aspek kehidupannya dan jejaknya dilacak sampai ke “akar-akarnya”.

Dalam *pleidoi*-nya, yang ditulis Fauzan Al-Anshari (2002: 128), Ba'asyir berujar, “Goci

(maksudnya Faturrahman Al-Ghozi) pun tidak terbukti sebagai ahli bahan peledak dari Jamaah Islamiyah yang akan meledakkan Singapura (*Media Indonesia*, 19/4). Apalagi dikatakan, bahwa saya adalah *Amir* (Ketua) Jamaah Islamiyahnya sebagaimana bagan organisasi JI yang dimuat di malah *Gatra* (2/2). Oleh karena itu, bagi saya, semua ini adalah konspirasi kampanye perang antiteroris AS yang sangat telanjang. Apalagi kemudian dikaitkan dengan pesantren Ngruki yang dianggap sebagai kamp pelatihan militer. Sampai-sampai ada reporter teve asing yang mengambil gambar semua lorong ponpes hingga lobang WC. Barangkali mereka menduga kami juga menyimpan bahan peledak di sana.

Cara pengaitan Goci dengan aktivitas dakwah saya lantaran dia adalah alumni ponpes Ngruki bagai pengaitan orang idiot.”

Gambaran ini jelas menunjukkan bahwa bagi Amerika dan sekutunya, Ba'asyir adalah musuh, namun bagi sebagian kelompok Islam, Ba'asyir dikenal dan dijuluki sebagai pejuang yang tidak pantang menyerah dalam mengembangkan

ideologi dan cita-cita yang diperjuangkannya. Majalah *Sabili*, misalnya, yang secara tegas menyuarakan aspirasi kelompok Islam garis keras pada edisi Januari 2003 menobatkan Abu Bakar Ba'asyir sebagai *Man of the Year 2002*. "Dia seorang pejuang Islam yang konsisten dan cocok jadi ulama besar. Ia bukan teroris," ujar Sejarawan terkenal dari Bandung, Mansyur Suryanegara.¹ Hal serupa juga diutarakan Deliar Noer, "Pendiriannya tetap menegakkan syariat Islam. Jika Ba'asyir dituduh terlibat kekerasan seperti rencana pembunuhan terhadap Megawati, itu di luar jangkauan pemikiran beliau. Tindakan Polisi itu keterlaluan, harusnya dibebaskan saja, diselidiki saja, jangan menggantungkannya ke al-Faruq."²

Ba'asyir adalah legenda, kendati dirinya menghadapi sorotan internasional dan nasional atas tuduhan berat sebagai pemimpin teroris Asia Tenggara dengan ancaman hukuman mati ganda. Ba'asyir telah berulang kali menggugat media massa internasional yang tidak adil dan tidak *fair* dalam menetapkan siapa teroris dan siapa yang bukan teroris. Dapat dikatakan, media massa internasional, terutama majalah *Time*, sebelum peledakan bom di Bali pun sudah sangat serius menabuh "genderang perang" dan "berburu" Ba'asyir. Hal ini diungkapkan Ardian Husaini dalam salah satu tulisannya di *Republika*, sepuluh hari menjelang tragedi Bali.

Sekarangnya, selama tahun ini, sudah empat kali (edisi 11 Februari, 1 April, 23 September, dan 30 September) majalah tersebut membuat laporan yang memojokkan Ba'asyir. Pesan dari laporan itu sangat gamblang Abu Bakar Ba'asyir pimpinan PP Al-Mukmin Ngruki, Solo, adalah orang yang berbahaya bagi AS dan karena itu harus ditangkap dan diperlakukan sebagai teroris. Cerita tentang Ba'asyir, Omar Al-Faruq, Agus Dwikarna, Fathurrahman Al-Ghazi, dan sebagainya, di media-media Barat, juga pada sebagian media massa Indonesia, dibuat menyeramkan. Seolah-olah Ba'asyir lebih berbahaya bagi bangsa Indonesia ketimbang gerakan organisasi Papua Mereka atau gerakan separatisme Uskup Belo yang telah sukses melepas Timtim dari Indonesia (Husaini, 2002a: 5).

Untuk pemberitaan yang bernuansa sangat

memojokkan dan telah mencemarkan nama baiknya ini, pada tanggal 1 Oktober 2002, melalui kuasa hukumnya, Muslim T. Mahendradatta, Ba'asyir mengadakan majalah *Time* serta reporternya, Jason Tedjasukmana, ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Belum juga kasus gugatannya kepada majalah *Time* diproses, Ba'asyir sudah dihadapkan pada kasus peledakan di Bali. Karena tekanan skenario global, Ba'asyir pun dijadikan tersangka pada kasus peledakan itu, kendati belum terdapat bukti keterlibatannya. Langkah pemerintah Indonesia dalam menangkapi tokoh-tokoh Islam tersebut dengan tuduhan terlibat terorisme pun sangat disesalkan oleh berbagai kalangan. Bahkan, penangkapan atas Ba'asyir di bangsal No. 9 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Solo, tanggal 28 Oktober 2002, oleh banyak pihak di dalam negeri sebagai, "tindakan yang sangat zalim". Beberapa tokoh Islam, secara terbuka mengecam penangkapan atas Ba'asyir yang sedang terbaring sakit. Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang, Ahmad Sumargono dan pengamat hukum dari UGM, Prof. Dr. Muchson, bahkan menilai bahwa "prosedur penangkapan Ba'asyir terlalu dipaksakan."³

Berita terakhir menunjukkan kenyataan yang kontradiktif. Menurut hasil investigasi kepala *Australian Federal Police* (AFP), Mick Keetly, "Beberapa pelaku pengeboman di Bali boleh jadi mendapat *special deals* dari tim penyidik Indonesia hingga mau memberi kesaksian bahwa Abu Bakar Ba'asyir ikut terlibat mengorganisasi serangan 12 Oktober."⁴ Sementara itu, pihak pemerintah Indonesia sendiri, dalam hal ini diwakili Kapolri, Jenderal Da'i Bachtiar, bersikukuh bahwa Ba'asyir memang berada di balik skenario pemboman di Bali, sebagaimana dinyatakan di hadapan pers. "Rencana itu telah diwujudkan di Sari Club, Paddy's, dan Konsulat AS di Bali yang dilakukan Muschlas dan Imam Samudera. Operasi itu terungkap telah mendapat restu dari Amir JI, yakni Abu Bakar Ba'asyir," ujar Da'i Bachtiar.⁵

Menurut Danny Hernawan, dosen FISIP Universitas Djuanda Bogor, langkah yang diambil pemerintah ini merupakan, "Stigmatisasi secara sistematis yang menggiring bahwa Islam adalah

identik dengan terorisme kini terus dikembangkan dan diperluas sehingga nuansanya sampai pada tahapan konflik terbuka.”⁶ Proses stigmatisasi ini juga didukung oleh pemberitaan media massa yang begitu intensif menjadikan kasus peledakan di Bali sebagai berita utama. Penggambaran peristiwa peledakan di Bali ini oleh televisi asing ditayangkan begitu mengerikan, lebih mengerikan dibandingkan tayangan tragedi di Gedung *World Trade Center* (WTC) di New York yang ditabrak pesawat bunuh diri, yang menelan korban tewas 3.000 orang. Pada kasus bom di Bali yang menelan lebih dari 180 orang, ditayangkan secara berulang-ulang tubuh-tubuh korban terbakar, ceceran darah, serta serpihan tubuh mayat. Media massa internasional pun seakan memperkokoh opini yang sudah terbentuk bahwa dalang semua perbuatan terorisme ini adalah kelompok Islam garis keras, terutama dengan ditangkapnya Ba’asyir.

Ba’asyir dalam Praktik Wacana yang Terpinggirkan

Paul Ricoeur (2002:30) menulis, ”Bermula dari distingsi Saussure antara *langue* dan *parole*, kita dapat mengatakan, setidaknya pada tahap pengenalan, bahwa wacana merupakan peristiwa bahasa.” Aspek penting dari wacana, menurut Ricoeur, wacana dialamatkan atau diarahkan kepada seseorang. Foucault (dalam Eriyanto, 2002:65) mendeskripsikan wacana dalam media massa bukan sekadar rangkaian kata-kata atau proposisi dalam teks, tetapi lebih kepada sesuatu yang memproduksi yang lain (sebuah gagasan, konsep, atau efek). Pemaknaan lebih jauh dipaparkan Edward W. Said dalam investigasinya. Said menemukan kecenderungan bahwa peristiwa bahasa (wacana) dalam konteks media massa tidak hanya menggambarkan, tetapi juga mendefinisikan sebuah realitas politik.

Lewat karyanya yang monumental, *Covering Islam*, Edward W. Said, ilmuwan non-Muslim keturunan Arab, menuturkan bahwa praktik wacana di media massa dalam peliputan Islam dan terorisme terdapat fakta dan kecenderungan seperti berikut ini:

Kita justru lebih sering hanya menemukan para jurnalis yang membuat pernyataan-pernyataan berlebihan, yang begitu saja dicomot dan kemudian didramatisir oleh media. Tampak dalam kerja mereka suatu konsep licik yang terus-menerus disinggung, yaitu “fundamentalisme”, sebuah kata yang diasosiasikan secara otomatis dengan Islam, meskipun ia juga memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat Kristen, Yahudi, dan Hindu. Asosiasi yang diciptakan dengan sengaja antara Islam dan fundamentalisme pada dasarnya adalah hal yang sama (Said, 2002: xx).

Pada buku ini pun, Edward secara gamblang mengungkapkan begitu banyak pendistorsian atas fakta-fakta yang selama ini digambarkan oleh media massa atas relasi Islam dan terorisme. Ini tidak mengherankan mengingat wacana media massa, menurut Deddy Mulyana (dalam Eriyanto, 2002: x), dengan menggunakan paradigma Peter D. Moss (1999), merupakan konstruk kultural yang dihasilkan ideologi karena, sebagai produk media massa, berita surat kabar menggunakan kerangka tertentu untuk memahami realitas sosial.

Media massa, pada posisi ini, menjadi wilayah pertempuran memperebutkan wacana, “Karena barang siapa yang memenangkan pertempuran itu ia bisa mendominasi dan melakukan hegemoni” (Panuju, 2002: 43). Oleh karena itu, tidak mengherankan bila dalam banyak kasus, ”Pemberitaan media, terutama yang berhubungan dengan peristiwa yang melibatkan pihak dominan, selalu disertai penggambaran buruk pihak yang kurang dominan” (Sobur, 2001: 36). Sehingga, wajar bila pihak tertentu yang memenangkan pertempuran wacana di wilayah *public sphere* ini, akan memiliki kendali atas wacana yang digulirkan kepada publik. Pihak yang memenangkan pertempuran wacana ini pada gilirannya akan menentukan cara pandang kita terhadap dunia.

Gambaran hegemoni atas wacana ini dilukiskan Jalaluddin Rakhmat (1998: 42), dengan mengutip kata-kata Noam Chomsky, bahwa negara-negara Adikuasa, “Secara sistematis dan terus-menerus telah melukiskan gambaran dunia tertentu pada benak kita. Untuk memudahkan memori kita dalam menyimpan informasi peristiwa-peristiwa di

dunia itu diberi label.” Dalam peristiwa tragedi pemboman di Bali, label teroris ditudingkan kepada Ba’asyir dan kelompok garis keras Jamaah Islamiah.

Pada situasi seperti ini, menurut terminologi Foucault (2001:67), “Publik tidak dikontrol lewat kekuasaan yang sifatnya fisik, tetapi dikontrol, diatur, dan disiplinkan lewat wacana.” Kemudian Foucault juga menggambarkan tentang relasi media massa dan kekuasaan, bagaimana kekuasaan tersebut melakukan marginalisasi kepada seseorang atau kelompok tertentu. Foucault menunjukkan bahwa:

“Konsep seperti gila, tidak gila, sehat, sakit, benar, dan salah, bukanlah konsep abstrak yang datang dari langit, tetapi dibentuk dan dilestarikan oleh wacana-wacana yang berkaitan dengan bidang-bidang seperti psikiatri, ilmu kedokteran, serta ilmu pengetahuan pada umumnya. Dalam suatu masyarakat biasanya terdapat berbagai macam wacana yang berbeda satu sama lain, namun kekuasaan mendukung wacana tertentu sehingga wacana tersebut menjadi dominan, sedangkan wacana-wacana lainnya akan terpinggirkan *marginalized* atau terpendam *submerged*.” (Eriyanto, 2001: 77).

Dengan kata lain, media massa dapat menjadi sarana proses marginalisasi kelompok yang didominasi oleh kelompok dominan. Bila ternyata Ba’asyir memang benar, sebagaimana dikemukakan Ibrahim dan Romli (2003), adalah korban rekayasa, korban konspirasi, korban disinformasi, dan korban mispersepsi akibat *trial by the press* yang dilakukan media massa. Melalui cara pandang Foucault, berarti pada liputan kasus bom Bali dan dramatisasi atas peran Ba’asyir sebagai otak terorisme, telah terjadi proses marginalisasi lewat wacana atas diri Ba’asyir dan Jamaah Islamiyah, bahkan Islam pada gilirannya. Konsep-konsep *teroris, terorisme, radikal, radikalisme, militan, fundamentalis, fundamentalisme*, disosialisasikan dan dikukuhkan oleh wacana yang dibentuk oleh pihak dominan (pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat) di media massa. Selain itu, akibat marginalisasi ini, penggambaran yang buruk terhadap Ba’asyir, Jamaah Islamiyah, dan Islam menjadi sebuah keniscayaan sebagai pihak yang

didominasi.

Media, dalam hal ini, telah menjadi instrumen ideologi, yang menyebarkan pengaruh kelompok dominan atas kelompok terdominasi. Pada posisi ini, media digambarkan oleh Stuart Hall, hanya berpihak pada kepentingan ekonomi dan politik kaum dominan, seperti dijabarkan dalam rumusan-rumusan berikut ini:

1. Media bukanlah ranah yang netral di mana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapat perlakuan yang sama dan seimbang. Media justru bisa menjadi subjek yang mengonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan kepada khalayak. Media berperan dalam mendefinisikan realitas kelompok dan ideologi dominanlah yang biasanya lebih berperan dalam hal ini (dalam Sudibyo, 2001:55).
2. Media berfungsi menggerakkan dukungan untuk kepentingan kelas yang berkuasa (dalam Ritonga dan Iskandar, 2002:99).
3. Pesan media melayani kekuasaan yang mapan, diproduksi oleh sebuah industri yang terkonsentrasi pada sejumlah besar korporasi pembuat profit, sebuah industri yang bergantung pada periklanan untuk keuntungannya, tergantung pada pejabat pemerintah sebagai sumber, ditekankan oleh kelompok-kelompok penekan, dan diwarnai dengan ideologi tertentu (dalam Ritonga dan Iskandar, 2002:99).

Gambaran sebuah majalah berita terkemuka di Indonesia pada edisi 28 Oktober – 3 November 2003, dalam tulisan berjudul “Diakah Sang Imam?”, menurut Ibrahim dan Romli (2003:28), dapat menggiring opini pembaca kepada kesimpulan bahwa benar ada Jamaah Islamiyah, benar Abu Bakar Ba’asyir Sang Imam Jamaah Islamiyah, dan Ba’asyir jugalah yang memang mengajarkan dan mendorong kekerasan (jihad) ke Maluku, dan lain-lain. Juga penentangan Ba’asyir atas asas tunggal Pancasila, dugaan kuat dialah pelaku bom Natal, dan Ba’asyir memang terkait dengan jaringan al-Qaida. Dalam wacana di media cetak, marginalisasi dan penggiringan opini pembaca atas Ba’asyir

pun dapat terjadi hanya dengan selintas membaca konstruksi judul berita yang dicantumkan. *Koran Tempo* menulis judul berita, "Teroris Ngruki yang Menggetarkan Bush" (11/9/2002). *Koran Kompas* menulis judul berita, "Ustad Menanam Dakwah, Ustad Menuai Teror" (2/11/2002).

Deddy Mulyana menjelaskan lebih jauh bahwa lewat narasinya, surat kabar menawarkan definisi tertentu mengenai kehidupan manusia: siapa pahlawan dan siapa penjahat, apa yang baik dan apa yang buruk bagi rakyat; apa yang layak dan apa yang tidak layak untuk dilakukan seorang pemimpin; tindakan apa yang disebut perjuangan (demi membela keadilan dan kebenaran) dan pemberontakan atau terorisme,(dalam Eriyanto, 2002:x). Dalam narasi surat kabar, tentang pemberitaan bom Bali pun tampak jelas fenomena ini. Ardian Husaini, misalnya, mengutip narasi dari dua koran yang berbeda, namun mengisyaratkan definisi yang sama. Presiden Bush meminta Megawati untuk lebih tegas lagi menindak kelompok militan yang terkait dengan terorisme global. (*Kompas*, 28/10/2002). Hal ini sejalan dengan pernyataan Menhan Australia yang meminta agar TNI berperan lebih tegas terhadap teroris. Yang dimaksud dengan teroris oleh Hill adalah "Islam militan Indonesia" (*Koran Tempo*, 28/9/2002). Bush memaksudkan kelompok militan yang teroris itu adalah Islam militan, demikian juga halnya dengan Hill. Seakan tidak ada kemungkinan (definisi) lain yang berada di balik kesimpulan itu, selain militan, teroris, dan Islam.

Selanjutnya, media massa nasional pun pada kondisi ini seakan ikut serta mengukuhkan rumusan-rumusan yang sudah disebarkan media massa internasional (Barat) dalam mendefinisikan realitas teroris, terorisme, Ba'asyir, Al-Qaida, Jamaah Islamiyah, dan lain-lain. Keprihatinan atas sikap semena-mena media massa Barat pun sudah sejak lama diungkapkan oleh Jalaluddin Rakhmat:

Media massa internasional melestarikan kamus khusus yang dibuat oleh negara-negara Adikuasa. Siapa yang termasuk teroris? yakni, yang membunuh cicilan tadi, membunuh karena tertekan, atau kelompok kecil yang melakukan kekerasan dalam keadaan tak berdaya. Bila

diibaratkan, teroris adalah semut kecil yang menggigit karena diinjak-injak. Pokoknya teroris adalah kelompok-kelompok kecil yang melakukan perlawanan terhadap kekuatan besar. Media massa akan membenarkan tindakan pembunuhan massal dan menyebutnya bukan teroris. Yang harus dilakukan oleh media massa Islam adalah membongkar mitos-mitos yang ada. Lebih baik teroris dikenakan kepada Amerika atau Israel (Rakhmat, 1998: 36).

Pendapat pakar komunikasi, Jalaluddin Rakhmat, itu semakin menegaskan bahwa sejak lama secara sistematis media massa internasional telah melakukan proses penjulukan *dan stigmatisasi* teroris terhadap umat Islam. Sehingga tidak mengherankan kasus pesawat bunuh diri yang menghancurkan gedung kembar *World Trade Center* (WTC), sebagai pusat kejayaan ekonomi Amerika Serikat, dan gedung pertahanan Pentagon, sebagai kedigjayaan sistem keamanan Amerika Serikat, pada tanggal 11 September 2001, pelakunya dituduhkan kepada orang Islam meski sampai saat ini belum terbukti kebenarannya. Menurut Muttaqin dan Sukidi (2001:12), "Pada mulanya adalah kriminalitas politik....kemudian didekati menggunakan sentimen agama." Oleh karena itu, Presiden Bush, meski tanpa fakta dan bukti yang kuat pun, secara terbuka menuduh sekaligus memberikan label negatif (*stereotype*) terhadap Usamah bin Ladin sebagai tersangka utama. "Bukan suatu kebetulan, bin Ladin adalah Muslim, yang selama ini – benar atau salah – dicap Muslim radikal dan fundamentalis" (Muttaqin dan Sukidi, 2002:13).

Karena alasan ini juga, Amerika Serikat secara emosional melakukan penyerangan terhadap Afganistan yang dicurigai sebagai basis Al Qaida yang dipimpin bin Ladin. Bahkan, dari masa ke masa, semua kejadian yang "berbau" terorisme selalu ditudingkan kepada pihak Islam sebagai pelakunya. Pernah suatu ketika gedung federal Alfred P. Murrah di Oklahoma City diledakkan, secara spontan pemerintah AS menuduh terorisme Timur Tengah berada di balik aksi kekerasan itu. Effendi (2001:54) mengulas bahwa untuk kasus ini Amerika mengambil sikap:

Melalui intelijen Mossad, mereka bukan saja membalas kejutan dengan menangkap aktivis dan tokoh Hamas (Harakah al-Muqawwamah al-Islamiyah), seperti Abu Yasin (lahir 1937), tetapi juga meningkatkan aksi teror mereka terhadap Muslim Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Walaupun begitu, pemerintah AS akhirnya harus menanggung malu karena ternyata pelaku pemboman sesungguhnya adalah Timothy McVeigh, seorang mantan marinir AS yang pernah diturunkan dalam Perang Teluk.

Seolah tidak jera atas peristiwa ini, Amerika pun mengambil sikap yang serupa pada kasus peledakan WTC dan Bali. Mengapa ini terjadi? Mengapa Islam melalui sosok Ba'asyir seakan menjadi bulan-bulanan media yang sebagian besar hanya menarik untung atas peningkatan oplah dari berita-beritanya yang diperoleh tidak melalui proses cek dan ricek, berita-beritanya yang sensasional, dan keberpihakannya pada kepentingan ekonomi semata?

Dalam perspektif *cultural studies*, menurut Redi Panuju (2002: 99-100), "Realitas sejarah seperti ini merupakan kekalahan kelompok agama (Islam) dalam pertarungan wacana, kekalahan dalam strategi *lobbying*, kekurangan akses kepada pusat-pusat kekuasaan dan sumber legitimasi lainnya." Saat realitas wacana yang ditawarkannya tidak memiliki kekuatan dalam pembentukan suprastruktur negara, maka sebuah konsekuensi logis bila kemudian kelompok agama tersebut termarginalkan.

Hal ini juga sudah jauh-jauh hari diingatkan Jalaluddin Rakhmat (1998:30), bahwa perlu adanya usaha-usaha membentuk wacana tandingan atas wacana teks media massa yang selama ini dikuasai media massa Barat dan media massa nasional yang mengekor karakteristik media Barat dalam meliputi Islam. Jalaluddin Rakhmat mengatakan, "Yang harus dilakukan oleh media massa Islam adalah membongkar mitos-mitos yang ada." Ini mengingatkan kita pada kata-kata Antonio Gramsci sebagaimana dituturkan kembali oleh Alex Sobur (2001:30), bahwa "di satu sisi media dapat menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. Namun di sisi lain,

media juga, menurutnya, dapat menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

Sudah saatnya media massa Islam membangun wacana tandingan dan mengalihkan debat wacana yang selama ini berujung pada kesimpulan tunggal kepada wacana yang memungkinkan munculnya kesimpulan alternatif, guna membangun diskursus yang akan memperkaya khasanah proses pemerikayaan masyarakat dalam hal akses informasi yang lebih *fair* dan adil. Ini juga yang diungkapkan Agus Sudibyo (2001:186), "Jika wacana tandingan itu dapat diberdayakan, bisa jadi kebenaran dan keadilan yang menjuluri setiap entitas konflik antara masyarakat bawah dan negara *vis a vis* tidak lagi menjadi hak 'prerogatif' elit kekuasaan."

Stigmatisasi atas Ba'asyir dan Kelompok Islam

Sebenarnya, tuduhan yang keras terhadap peran serta media massa dalam proses stigmatisasi terhadap umat Islam yang selalu diidentikkan dengan teroris, radikal, bukanlah hal yang baru. Redi Panuju menyebutkan hal ini telah berkembang lewat polemik kebudayaan semenjak tahun 1935-an. Redi memaparkan bahwa:

"Melalui publikasi informasi yang dikuasai oleh barat, terbangun opini publik yang mencitrakan negatif agama Islam dan masyarakat penganutnya. Islam digambarkan sebagai agama yang menganjurkan cara kekerasan, Islam digambarkan sebagai agama yang hanya mementingkan akhirat sehingga tidak peduli pada persoalan duniawi. Islam juga digambarkan sebagai agama terbelakang yang tidak memiliki daya adaptasi. Huntington, misalnya, merumuskan tesis bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti — individualisme, liberalisme, konstitualisme, hak asasi manusia, kesetaraan pasar bebas dan penegakkan hukum — tak bisa diterima oleh selain Barat" (Panuju, 2002:100-101).

Meskipun demikian, tesis Huntington itu

banyak juga dibantah, salah satunya dilakukan Robert W. Hefner. Dalam bukunya, *Civil Muslim and Democratization in Indonesia* yang dituturkan kembali oleh Panuju (2002:101), Hefner mengemukakan bahwa komunitas Islam kalah dalam publikasi dan inovasi informasi, sehingga arus komunikasi antara yang positif dan negatif menampakkan kesenjangan luar biasa, terjadinya hiper-realitas (*hyper-reality*) terhadap informasi Islam. Banyak hal-hal positif dan potensial progresif tidak terekspos, sementara hal yang kecil ter-*blow-up* menjadi stigma yang sangat besar.

Menurut Amien Rais (1999:131), pernah suatu ketika, “Sejumlah pendeta Kristen Amerika Serikat menyekalkan kecenderungan media massa Amerika untuk menghubungkan terorisme yang terjadi di Timur Tengah, atau yang berasal dari Timur Tengah, dengan ajaran Islam. Para pendeta itu tahu bahwa tidak ada secuil pun ajaran Islam yang membenarkan teror, sehingga mereka menganggap media massa Amerika sebagai sangat tendensius dan telah terperangkap ke dalam kepentingan politik tertentu. Para pendeta Kristen itu tampaknya punya tanggung jawab moral untuk meluruskan persepsi keliru media massa Amerika tentang Islam.”

Kutipan ini jelas menunjukkan betapa kuatnya media massa melalui agendanya dalam membangun label teroris terhadap Umat Islam. Pada konteks tertentu, media massa Barat pun senantiasa menghubungkan radikalisme dengan Islam.

Di dalam negeri sendiri, usaha **stigmatisasi** ini dapat diterjemahkan dalam konteks politik. Oleh beberapa kalangan, penangkapan terhadap tokoh Islam Ba’asyir ini, dipandang sebagai usaha penggemosan terhadap partai politik Islam pada Pemilu yang tidak akan lama lagi berlangsung (tahun 2004). Pada tahun 1980, suasana seperti ini pun terjadi, para tokoh Islam banyak ditangkap. Tujuannya adalah untuk menimbulkan *deterrent effect* (meminjam istilah dari Hadimulyo)⁷, agar publik tidak mendukung parpol Islam dalam Pemilu mendatang.

Argumen serupa dikemukakan oleh Ibrahim dan Romli bahwa:

“Konstelasi politik Indonesia yang diwarnai

dinamika benturan kepentingan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis-religius (kelompok Islam) turut terkena dampak isu terorisme. Bahkan, perburuan terhadap terorisme yang sebenarnya merupakan agenda politik Amerika Serikat, dijadikan agenda pemerintah Megawati yang *notabene* dari kelompok nasionalis-sekuler untuk mengusung kepentingannya.” (Ibrahim dan Romli, 2003:124).

Melalui pencitraan yang negatif atas relasi Ba’asyir, terorisme, dan Jamaah Islamiyah, dengan sendirinya lawan politik parpol Islam banyak sekali mengharapkan akan mengeruk keuntungan dalam meraih dukungan publik. Sebab, dengan ditangkapnya orang Islam sebagai pelaku pemboman, ada *hidden effect* yang ingin dihasilkan, yaitu selayaknya semua orang Islam harus diwaspadai, juga parpol Islam.


Oleh karena itu, penangkapan atas diri Ba’asyir yang dituduh sebagai dalang terorisme, utamanya sebagai tersangka pemboman di Bali, telah mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan. Tak kurang para ilmuwan, politisi, dan tokoh-tokoh Islam mengecam keras sikap pemerintah atas penangkapan Ba’asyir yang dinilai mereka sangat “kental” bermuatan politis. Menurut Djoko Susila, dari Komisi I DPR Fraksi Reformasi, dalam proses penangkapan itu ada semacam *Islamophobia* dari tubuh aparat penegak hukum.⁸ Terlebih semua tersangka kebetulan beragama Islam. Lengkaplah sudah “cap” terhadap Islam dan terorisme menjadi satu paket tak terpisahkan. Namun demikian, banyak kalangan menyadari sepenuhnya bahwa label teroris yang dialamatkan kepada Ba’asyir dan Islam merupakan usaha stigmatisasi yang sistematis. Sampai saat ini, wacana tandingan yang bertujuan mengurangi dan menyembuhkan stigma tersebut masih relatif sedikit jumlahnya dibandingkan dengan luberan informasi yang disajikan wacana media massa yang memang “antusias” mendeskreditkan Ba’asyir dan Islam. Riza Sihbudi (2002:68) menggambarkan betapa hampir setiap hari masyarakat dicekoki opini yang mengarahkan bahwa pelaku Bom Bali adalah Umat Islam. Padahal, menurutnya, semua ini jelas

merupakan konspirasi yang telah dirancang secara sistematis dengan menggunakan kampanye disinformasi oleh CIA untuk mendukung kebijakan anti-Islam -- Sihbudi menyebutnya sebagai perang melawan Islam (*war on Islam*) - yang dimotori oleh Presiden AS George W. Bush. Bahkan, melalui tersangka lain, Imam Samudra, yang di *blow-up* terus-menerus oleh media massa melalui ungkapan-ungkapan yang ekstrem, juga semakin memperkokoh stereotip orang Islam adalah teroris.

Islamophobia pun terjadi di mana-mana, bukan hanya menimpa aparat penegak hukum di Indonesia yang menangkap Ba'ayir yang tengah terbaring sakit di kala itu, tetapi juga sudah menjadi gejala politik global. Bahkan Australia, yang memang mengalami kerugian terbesar pada peledakan di Bali karena menelan korban terbanyak warga negaranya, telah melakukan aksi pengeledahan terhadap rumah warga Negara Indonesia (WNI) Muslim di Australia. Aksi serupa sebenarnya pernah terjadi pascatragedi WTC September 2001, di beberapa wilayah di Australia, orang Islam dijadikan sasaran kemarahan, tidak hanya itu, beberapa Mesjid bahkan dirusak oleh penduduk Australia. Di Amerika sendiri, situasinya lebih gawat lagi, orang-orang Islam diawasi ketat, bahkan ada yang dianiaya pascatragedi WTC itu. Hal ini sehubungan dengan tuduhan Amerika, bahwa pelaku pesawat bunuh diri itu adalah orang Islam.

Terjadinya *Islamophobia* adalah bukti bahwa *stigma* (cacat) atas kelompok Islam dengan sukses sudah ditebarkan dalam lingkungan politik global dan nasional. Riza Sihbudi (2002) pun mengakui bahwa stigma Islam identik dengan terorisme tampaknya cukup sukses dikembangkan melalui berbagai kampanye disinformasi jaringan intelijen yang didukung media massa kelas dunia. Telah terbukti, perang melawan terorisme yang digembar-gemborkan Amerika Serikat ternyata sasarannya satu, yaitu memerangi kelompok-kelompok Islam yang mereka sebut fundamentalis, radikal, militan. Citra negatif atas Ba'ayir dan kelompok Islam, yang telah dirancang kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan di dalam negeri sendiri, baik politisi, pejabat pemerintah, maupun

militer, serta diintensifkan sosialisasinya oleh media massa, menjadi semakin *powerful* memarginalkan partai politik Islam dan Umat Islam Indonesia secara keseluruhan dalam percaturan politik nasional.

Pertanyaannya sekarang: bagaimana format liputan media massa di masa mendatang? Akankah tetap seperti dikatakan Jalaluddin Rakhmat (1998:9), "Berbaris rapi di belakang media Barat menjajakan pandangan dunia mereka. Apa yang dipandang penting oleh Barat dipandang penting juga oleh kita." Mulai tertantang jugakah kalangan media massa Islam untuk melakukan upaya yang serius membentuk wacana tandingan atas hegemoni wacana media Barat yang selama ini menjadi wacana dominan? Mampukah wacana media massa Islam melakukan advokasi atas Ba'ayir sehingga dapat menumbangkan opini publik yang terlanjur melekat kepadanya sebagai dalang terorisme? Banyak lagi pertanyaan yang membutuhkan ruang diskursus lain dan upaya riil menelusuri kebenaran di balik berbagai kesimpangsiuran informasi yang berkembang selama ini. Karena, publik perlu tahu (*the right to know*) dan berhak untuk mengetahui realitas yang sesungguhnya. Meski tugas wartawan (media massa dalam hal ini), meminjam kata-kata Deddy Mulyana, "Sebenarnya bukan untuk menyingkap kebenaran, karena kebenaran mutlak itu tidak akan pernah kita ketahui, tetapi menanggalkan semaksimal mungkin bias-bias yang mereka anut selama ini" (dalam Eriyanto, 2002:xviii). *Wallahu a'lam.* 

Catatan kaki:

- ¹ "Ustadz Ba'ayir Melawan Kafir Harbi," dalam majalah *Sabili*, edisi 2 Januari 2003, hal. 22-23.
- ² *Ibid.*
- ³ Dalam rubrik Fokus: "Kita Dizalimi Bangsa Sendiri," *Republika*, 29 Oktober 2002, hal. 1.
- ⁴ "Special Deals dan Rekaman Palsu Usamah," dalam *Republika*, 12 Januari 2003.
- ⁵ "Nama Ba'ayir Sering Dikaitkan Kasus Bali," *Pikiran Rakyat*, 29 Januari 2003.
- ⁶ Dalam rubrik Fokus: "Jangan Hanyut dalam Agenda Barat," *Republika*, 11 November 2002, hal. 1.
- ⁷ Dalam rubrik Fokus: "Jangan Hanyut dalam Agenda Barat," *Republika*, 1 November 2002, hal. 1.

⁸ Dalam rubrik Fokus: “Kita Dizalimi Bangsa Sendiri,” *Republika*, 29 Oktober 2002, hal. 1.

Daftar Pustaka

- Al-Anshari, Fauzan. 2002. *Saya Teroris? Sebuah “Pleidoi”*. Jakarta: Republika.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKIS.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Husaini, Ardian. 2002a. “Antara Ba’asyir dan Sharon,” *Republika*, 2 Oktober : 5.
- _____. 2002b. *Terorisme dan Konspirasi anti-Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Asep Syamsul M. Romli. 2003. *Kontroversi Ba’asyir: Jihad Melawan Opini “Fitnah” Global*. Bandung: Nuansa.
- Muttaqin Farid dan Sukidi. 2001. *Teroris Serang Islam: Babak Baru Benturan Barat-Islam*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Panuju, Redi, 2002. *Relasi Kuasa Negara, Media Massa dan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rais, Amien. 1999. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1998. *Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, dan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ricoueur, Paul. 2002. *The Interpretation Theory: Filsafat Wacana Membedah Makna dalam Anatomi Bahasa*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ritonga, Jamaluddin M. dan Dadan Iskandar. 2002. “Komunikasi dalam Krisis dan Demokrasi: Implikasi Teoretis dan Praktis,” dalam *Media-Militer-Politik: Crisis Communication: Perspektif Indonesia dan Internasional*. Yogyakarta: Friedrich Eber Stiftung dan Galang Press.
- Said, Edward W. 2002. *Covering Islam: Bagaimana Media dan Pakar Menentukan Cara Pandang Kita tentang Dunia*. Yogyakarta: Jendela.
- Sihbudi, Riza, dkk. 2002. *Teroris dan Konspirasi anti-Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKIS.